
PENGARUH DISIPLIN FISKAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 – 2023

Alifiah Nurmalasari¹⁾, Cahya Irawady²⁾, Farhatun Nisa³⁾

alifiah21001@mail.unpad.ac.id¹⁾, cahya.irawady@mail.unpad.ac.id²⁾,
farhatun.nisa@mail.un0ad.ac.id³⁾

^{1),2),3)}Universitas Padjajaran

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh disiplin fiskal terhadap kemandirian keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama periode 2017–2023. Subjek penelitian mencakup lima pemerintah daerah di DIY, dengan objek berupa rasio-rasio keuangan yang mencerminkan disiplin fiskal. Fenomena rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan pendapatan transfer, serta ketimpangan fiskal antarwilayah menunjukkan bahwa kemandirian keuangan belum tercapai secara optimal meskipun otonomi daerah telah lama diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh ketergantungan fiskal, penerimaan pajak daerah, dan rasio defisit anggaran terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemandirian keuangan. Selain itu, analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran kondisi fiskal daerah secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal berpengaruh negatif signifikan dan penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, rasio defisit anggaran terhadap PDRB berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Secara simultan, ketiga rasio tersebut berpengaruh signifikan. Temuan ini memberikan kontribusi dalam pengukuran multidimensi disiplin fiskal serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan fiskal yang berkelanjutan di daerah dengan karakteristik fiskal beragam seperti DIY.

Kata Kunci: Disiplin Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal, Penerimaan Pajak Daerah, Defisit Anggaran Terhadap PDRB

ABSTRACT

This study examines the effect of fiscal discipline on the financial independence of regency and city governments in the Special Region of Yogyakarta (DIY) during the 2017–2023 period. The subjects of this research are five local governments in DIY, while the objects are financial ratios that reflect fiscal discipline. The study is motivated by the low contribution of locally generated revenue (PAD) compared to central government transfers and fiscal disparities between regions, which indicate that regional financial independence has not been optimally achieved despite the implementation of decentralization. This research employs a quantitative approach with secondary data sourced from the Regional Budget Realization Reports (LRA). The analytical method used is multiple linear regression to assess the influence of fiscal dependency,

local tax revenue, and budget deficit ratio to Gross Regional Domestic Product (GRDP) on financial independence. In addition, descriptive statistical analysis is used to provide a comprehensive overview of regional fiscal conditions. The results show that fiscal dependency has a significant negative effect, while local tax revenue has a significant positive effect on financial independence. Meanwhile, the budget deficit to GRDP ratio has a negative but insignificant effect. Simultaneously, the three indicators of fiscal discipline significantly influence regional financial independence. These findings contribute to a multidimensional measurement of fiscal discipline and provide a basis for sustainable fiscal policy recommendations, particularly in regions with diverse fiscal characteristics such as DIY.

Keywords: *Fiscal Discipline, Regional Financial Independence, Fiscal Dependency, Local Tax Revenue, Budget Deficit To GRDP Ratio*

PENDAHULUAN

Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam mengelola keuangan dan menyusun kebijakan pembangunan berbasis potensi lokal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendorong daerah untuk lebih mandiri secara fiskal, salah satunya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pada kenyataannya, banyak pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2017–2023 menunjukkan bahwa kontribusi PAD di seluruh wilayah DIY konsisten lebih rendah dibandingkan pendapatan transfer yang diterima.

Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah di DIY belum mencerminkan kemandirian fiskal yang ideal. Kota Yogyakarta memiliki basis PAD yang relatif kuat, namun wilayah seperti Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul masih menghadapi tantangan dalam menggali potensi pendapatan lokal. Kondisi ini diperburuk oleh ketimpangan karakteristik fiskal antarwilayah di DIY. Kota Yogyakarta mencatat rasio kemandirian keuangan tertinggi, sedangkan Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul menunjukkan tingkat kemandirian yang sangat rendah dan stagnan. Selain itu, meskipun DIY memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi, PDRB per kapita dan UMR-nya tergolong rendah. Fenomena ini menunjukkan adanya anomali fiskal, di mana kualitas sumber daya manusia tidak selaras dengan kapasitas fiskal daerah.

Di sisi lain, pandemi COVID-19 memperparah tekanan fiskal, menyebabkan penurunan tajam PAD, lonjakan defisit anggaran, dan pemotongan belanja modal di banyak daerah. Misalnya, Pemerintah Bantul kehilangan potensi PAD sebesar Rp97 miliar pada tahun 2020,

dan Kota Yogyakarta memperkirakan penurunan PAD hingga 50 persen. Rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam pembayaran pajak dan defisit anggaran yang membesar selama krisis pandemi menjadi indikator bahwa upaya pencapaian kemandirian fiskal belum berjalan optimal.

Ketimpangan rasio kemandirian antarwilayah pun semakin mencolok, dengan Kota Yogyakarta mencatat rasio hampir 40%, sementara Kulon Progo dan Gunungkidul stagnan di bawah 20%. Hal ini memperlihatkan ketidakseimbangan struktural yang mendalam antara potensi ekonomi lokal dengan kapasitas fiskal daerah, dan menjadi dasar penting bagi evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

Periode 2017–2023 menjadi ruang analisis yang ideal karena mencakup masa stabil, masa krisis akibat pandemi, dan masa pemulihan fiskal. Hal ini memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap disiplin fiskal daerah di berbagai kondisi ekonomi. Disiplin fiskal dalam penelitian ini diukur melalui tiga rasio utama ketergantungan fiskal terhadap pusat, penerimaan pajak daerah, dan defisit anggaran terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ketiga rasio ini merepresentasikan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan, menekan ketergantungan, dan menjaga keseimbangan fiskal.

Penelitian sebelumnya cenderung mengkaji variabel-variabel ini secara terpisah. Padahal, dalam praktiknya, ketiga aspek tersebut saling terkait erat dalam mencerminkan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, pendekatan multidimensi diperlukan untuk memahami sejauh mana disiplin fiskal berkontribusi terhadap kemandirian keuangan daerah secara komprehensif.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin fiskal terhadap kemandirian keuangan pemerintah kabupaten dan kota di DIY pada periode 2017–2023. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah yang lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan dan Teori Stewardship

Penelitian ini menggunakan Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976) untuk menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah pusat

memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri. Meskipun demikian, ketidakseimbangan dalam pelaksanaan mandat seperti ketergantungan fiskal yang tinggi, rendahnya penerimaan pajak, atau defisit anggaran dapat mencerminkan kegagalan dalam hubungan keagenan. Oleh karena itu, disiplin fiskal menjadi indikator penting untuk menilai apakah pemerintah daerah telah menjalankan perannya secara efisien dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi Teori Stewardship, yang memandang pemerintah daerah sebagai steward yang memiliki komitmen intrinsik untuk mengelola keuangan publik secara bertanggung jawab. Pendekatan ini menekankan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak semata hasil pengawasan pusat, tetapi juga cerminan dari kesadaran dan tanggung jawab internal pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan serta menjaga keseimbangan fiskal. Dengan menggabungkan kedua teori ini, penelitian memiliki sudut pandang yang lebih komprehensif dalam menjelaskan pengaruh disiplin fiskal terhadap kemandirian keuangan daerah.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan potensi lokal dan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menegaskan pentingnya pendelegasian kewenangan melalui asas desentralisasi. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pemerintahan, memperluas partisipasi masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan. Dalam konteks ini, desentralisasi fiskal menjadi instrumen utama untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah, yakni kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dari sumber pendapatan sendiri tanpa ketergantungan berlebih pada dana transfer dari pusat. Menurut Kusumaputra (2021), keberhasilan otonomi fiskal ditandai dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya lokal, peningkatan fungsi pengawasan daerah, dan tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan. Variasi karakteristik fiskal antarwilayah, seperti yang terlihat di lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menunjukkan pentingnya mengukur sejauh mana prinsip otonomi diterapkan secara efektif. Dalam hal ini, kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Prinsip Dasar Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah yang efektif. Menurut Nasution (2019), pengelolaan keuangan yang baik harus berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, value for money, serta pengendalian dan pengawasan. Akuntabilitas dan transparansi memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh publik. Prinsip value for money menekankan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam belanja publik, sedangkan pengendalian dan pengawasan menjamin kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan aturan yang berlaku. Keempat prinsip ini mendukung terciptanya tata kelola fiskal yang baik, yang pada akhirnya memperkuat disiplin fiskal dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Disiplin Fiskal

Disiplin fiskal merupakan konsep yang merujuk pada upaya pemerintah dalam mengelola keuangan publik secara bertanggung jawab, efisien, dan berkelanjutan. Menurut Kumar dan Ter-Minassian (2007), disiplin fiskal menuntut pemerintah untuk mempertahankan posisi fiskal yang konsisten dengan stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan jangka panjang. Hal ini diperkuat oleh Barbier-Gauchard et al. (2021) yang mendefinisikan disiplin fiskal sebagai kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal melalui kebijakan yang ketat dan konsisten. Ketidaksiplinan fiskal dapat meningkatkan risiko fiskal dan mengurangi kepercayaan pasar (Kopits, 2012). Dalam konteks pemerintah daerah, disiplin fiskal mencakup perencanaan anggaran yang tepat sasaran, pengendalian belanja, serta evaluasi kinerja keuangan secara periodik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini mengukur disiplin fiskal melalui tiga rasio utama: ketergantungan fiskal terhadap pusat, penerimaan pajak daerah terhadap PAD, dan defisit anggaran terhadap PDRB. Ketiga rasio ini mencerminkan aspek kemandirian pendapatan, efektivitas fiskal, dan keseimbangan anggaran. Evaluasi terhadap indikator tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi fiskal daerah serta kontribusi disiplin fiskal terhadap peningkatan kemandirian keuangan, khususnya di wilayah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri melalui

Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa bergantung secara berlebihan pada transfer pusat (Halim, 2013 dalam Azwar, 2023). Rasio antara PAD dan total pendapatan daerah menjadi ukuran utama untuk menilai tingkat kemandirian keuangan. Semakin tinggi proporsi PAD, semakin besar otonomi fiskal yang dimiliki suatu daerah (Alfansa & Wibowo, 2022). Selain menunjukkan kapasitas anggaran, kemandirian fiskal juga mencerminkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi (Syam & Zulfikar, 2022). Oleh karena itu, kemandirian keuangan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencerminkan kedewasaan tata kelola daerah. Di wilayah DIY, rendahnya rasio PAD terhadap total pendapatan menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kemandirian keuangan. Diperlukan strategi optimalisasi pendapatan dan penguatan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ketergantungan Fiskal terhadap Kemandirian Keuangan

Ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat mencerminkan lemahnya kemandirian keuangan daerah. Semakin besar proporsi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah, semakin terbatas kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri. Dalam kerangka Teori Agensi, kondisi ini menunjukkan potensi kegagalan fungsi agen, di mana pemerintah daerah cenderung pasif dalam menggali potensi PAD dan bergantung pada dana pusat, yang dapat menimbulkan moral hazard. Sementara itu, menurut Teori Otonomi Daerah, tingginya ketergantungan fiskal mencerminkan lemahnya implementasi desentralisasi fiskal yang idealnya ditandai dengan kemandirian dalam pengelolaan keuangan. Hasil penelitian Kamilaus et al. (2020), Riza & Zuripal (2023), serta Digidowiseiso (2023) juga memperkuat bahwa ketergantungan fiskal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan tadi, hipotesa yang ada diuji didalam studi ini, yaitu:

H1: Rasio ketergantungan fiskal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Kemandirian Keuangan

Penerimaan pajak daerah mencerminkan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak, semakin besar kemampuan daerah membiayai kebutuhannya tanpa bergantung pada dana pusat. Dalam perspektif Teori

Stewardship, hal ini menunjukkan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan publik yang mampu memaksimalkan potensi lokal secara mandiri. Sementara itu, menurut Teori Otonomi Daerah, tingginya kontribusi pajak daerah memperkuat desentralisasi fiskal karena mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Hasil penelitian sebelumnya (Nggilu, 2016; Dewantoro, 2022; Hariyanti, 2021) mendukung bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan.

Berdasarkan penjelasan tadi, hipotesa yang ada diuji didalam studi ini, yaitu:

H2: Rasio penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Defisit Anggaran terhadap PDRB terhadap Kemandirian Keuangan

Rasio defisit anggaran terhadap PDRB mencerminkan kemampuan daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal. Secara teoritis, defisit yang tinggi dapat mempersempit ruang fiskal, mengurangi fleksibilitas anggaran, dan meningkatkan ketergantungan pada pembiayaan pusat, sehingga menurunkan kemandirian keuangan. Dalam kerangka Teori Agensi, kondisi ini menunjukkan kegagalan pengelolaan fiskal oleh pemerintah daerah sebagai agen. Namun, studi Fadli dan Asnawi (2022) menemukan bahwa defisit berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh besarnya peran dana transfer seperti Dana Otonomi Khusus yang menutupi dampak defisit, serta pengelolaan keuangan yang belum optimal. Dengan demikian, meskipun secara konsep defisit diperkirakan menurunkan kemandirian, pengaruhnya dalam praktik dapat dipengaruhi oleh banyak faktor lain.

Berdasarkan penjelasan tadi, hipotesa yang ada diuji didalam studi ini, yaitu:

H3: Rasio Defisit Anggaran terhadap PDRB berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah

Pengaruh Disiplin Fiskal terhadap Kemandirian Keuangan

Disiplin fiskal adalah prinsip kunci dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup optimalisasi pendapatan, pengurangan ketergantungan fiskal, dan pengendalian belanja agar selaras dengan kapasitas ekonomi. Penelitian ini mengukur disiplin fiskal melalui tiga indikator utama: ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, penerimaan pajak daerah, dan rasio defisit anggaran terhadap PDRB yang masing-masing merepresentasikan kapasitas daerah dalam menggali pendapatan, menjaga keseimbangan fiskal, dan mengurangi ketergantungan.

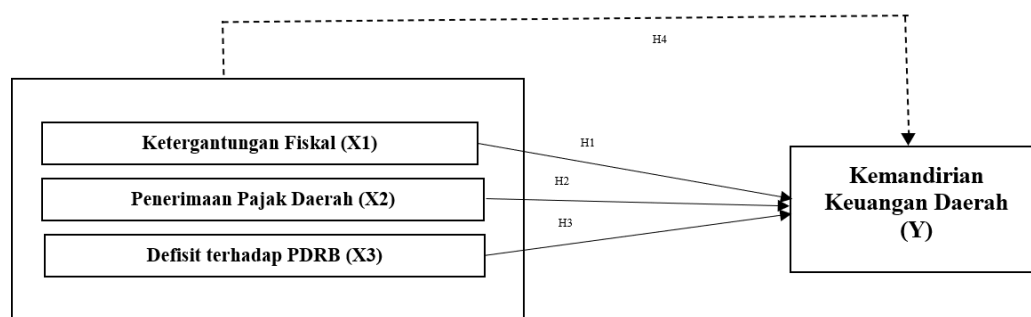
Dalam Teori Agensi, disiplin fiskal mencerminkan keselarasan antara pemerintah daerah (agen) dan masyarakat (prinsipal), sedangkan dalam Teori Stewardship, disiplin fiskal mencerminkan tanggung jawab moral pejabat publik dalam menjaga kesinambungan fiskal. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerimaan pajak berdampak positif terhadap kemandirian keuangan, sementara ketergantungan fiskal dan defisit anggaran berdampak negatif.

Meskipun demikian studi yang menguji ketiga indikator ini secara simultan masih terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggabungkan ketiganya dalam satu model guna menganalisis pengaruh disiplin fiskal terhadap kemandirian keuangan kabupaten/kota di DIY. Ketiga variabel dipilih berdasarkan relevansi teoritis, bukti empiris, dan konteks fiskal daerah, sehingga diyakini mampu merepresentasikan kondisi nyata dan mendukung pembentukan kerangka pemikiran penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan tadi, hipotesa yang ada diuji didalam studi ini, yaitu:

H4: Disiplin Fiskal yang diukur melalui rasio Ketergantungan Fiskal, Penerimaan Pajak Daerah, dan Defisit Anggaran terhadap PDRB secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Dengan merujuk pada landasan teori, tujuan penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta permasalahan fiskal yang telah diidentifikasi, maka dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Jenis dan Obyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal untuk menguji hubungan antara disiplin fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antar variabel melalui analisis data numerik secara statistik (Sugiyono, 2023). Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Obyek penelitian pada penelitian ini adalah variabel-variabel disiplin fiskal yang meliputi variabel independen yaitu ketergantungan fiskal, penerimaan pajak daerah, dan rasio defisit anggaran terhadap PDRB serta variabel dependen kemandirian keuangan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Kelima daerah tersebut dipilih karena memiliki karakteristik ekonomi dan kapasitas fiskal yang beragam, sehingga relevan untuk menguji hubungan antara disiplin fiskal dan kemandirian keuangan daerah.

Sampel

Sampel yang digunakan mencakup seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang terdiri dari lima daerah selama periode 2017 hingga 2023. Metode pengambilan sampel didalam studi adalah purposive sampling. Studi ini memfokuskan pada Kabupaten dan Kota yang ada di DIY melalui kriteria berikut:

Tabel 1 Kriteria Seleksi Sampel

No	Kriteria Seleksi Sampel	Jumlah Sampel
1.	Seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.	5
2.	Pengurangan sampel kriteria 1: Tidak memiliki data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara lengkap selama 2017–2023.	0
3.	Pengurangan sampel kriteria 2: Laporan keuangan belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	0
4.	Pengurangan sampel kriteria 3: Tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama periode penelitian.	0
	Jumlah Sampel	5
	Periode Penelitian	7
	TOTAL SAMPEL	35

Sumber : Data diolah, 2025

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta dokumen terkait lainnya. Data yang digunakan mencakup periode 2017 - 2023 dan bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pusat Statistik (BPS), serta website resmi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi.

Operasional Variabel

Tabel 2 Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Ketertangan Fiskal (X1)	Tingkat ketertangan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat	$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio (%)

	dalam membiayai kebutuhan daerah		
Penerimaan Pajak Daerah (X2)	Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan	$\frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$	Rasio (%)
Defisit Anggaran terhadap PDRB (X3)	Tingkat tekanan fiskal suatu daerah dengan membandingkan defisit anggaran terhadap kapasitas ekonominya (PDRB).	$\frac{\text{Defisit Anggaran}}{\text{PDRB}} \times 100\%$	Rasio (%)
Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menanggung pembiayaan pemerintahan dan pembangunan secara otonom tanpa mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.	$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio (%)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Tabel 3 Hasil Statistik Desriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ketergantungan Fiskal	35	0,5922	0,8720	0,725875	0,0877345
Penerimaan Pajak	35	0,1610	0,7373	0,450346	0,1856946
Defisit terhadap PDRB	35	0,0025	0,0116	0,006825	0,0022580
Kemandirian Keuangan	35	0,1206	0,4025	0,247796	0,0959236
Valid N (listwise)	35				

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2025

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data masing-masing variabel tanpa melakukan generalisasi (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap empat variabel: ketergantungan fiskal, penerimaan pajak daerah, rasio

defisit anggaran terhadap PDRB, dan kemandirian keuangan daerah, berdasarkan data tahun 2017–2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata ketergantungan fiskal sebesar 0,7258 dengan standar deviasi 0,0877, mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah di DIY masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Nilai minimum sebesar 0,5922 dan maksimum 0,8720 menunjukkan adanya variasi tingkat ketergantungan antar daerah.

Rata-rata penerimaan pajak daerah terhadap PAD sebesar 0,4503 dengan standar deviasi 0,1857 menunjukkan kontribusi pajak yang belum merata, menandakan kapasitas fiskal daerah belum optimal. Untuk rasio defisit terhadap PDRB, rata-rata tercatat 0,0068 dengan standar deviasi 0,0023, menunjukkan tekanan fiskal daerah cenderung rendah dan masih dalam batas aman. Sementara itu, tingkat kemandirian keuangan menunjukkan rata-rata 0,2478 dengan standar deviasi 0,0959, yang berarti sebagian besar daerah masih tergolong rendah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya secara mandiri. Rentang nilai antara 0,1206 hingga 0,4025 juga menunjukkan adanya kesenjangan antar kabupaten/kota. Temuan ini menegaskan bahwa secara umum, kemandirian fiskal di DIY masih lemah dan memerlukan optimalisasi pendapatan asli daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,02066035
Most Extreme Differences	Absolute	0,097
	Positive	0,080
	Negative	-0,097
Test Statistic		0,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2025

Berdasarkan output uji pada tabel 4, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual model regresi tersebar secara normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

		Collinearity Statistics	
	Model	Tolerance	VIF
1	Ketergantungan Fiskal	0,135	7,402
	Penerimaan Pajak	0,137	7,288
	Defisit terhadap PDRB	0,876	1,142

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2025

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel ketergantungan fiskal dan penerimaan pajak memiliki nilai VIF masing-masing sebesar 7,402 dan 7,288, yang meskipun masih di bawah ambang batas 10, menunjukkan adanya korelasi yang cukup kuat antar variabel. Sementara itu, variabel defisit anggaran terhadap PDRB memiliki nilai VIF sebesar 1,142 dan Tolerance 0,876, menandakan tidak adanya gejala multikolinearitas. Dengan demikian, model regresi dinilai bebas dari multikolinearitas serius, meskipun terdapat indikasi hubungan erat antar beberapa variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Correlations			
		Ketergantungan Fiskal	Penerimaan Pajak	Defisit terhadap PDRB	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Ketergantungan Fiskal	Correlation Coefficient	1,000	-0,880**	0,287
		Sig. (2-tailed)	0,000	0,095	0,985
		N	35	35	35
	Penerimaan Pajak	Correlation Coefficient	-0,880**	1,000	-0,271
		Sig. (2-tailed)	0,000	0,115	0,896
		N	35	35	35
	Defisit terhadap PDRB	Correlation Coefficient	0,287	-0,271	1,000
		Sig. (2-tailed)	0,095	0,115	0,433
		N	35	35	35
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	0,003	-0,023	-0,137
		Sig. (2-tailed)	0,985	0,896	0,433
		N	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2025

Uji Spearman menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, yaitu ketergantungan fiskal (0,985), penerimaan pajak (0,896), dan defisit anggaran terhadap PDRB (0,433). Hasil ini mengindikasikan tidak adanya hubungan signifikan antara residual dengan variabel independen, sehingga model dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. Penggunaan uji Spearman memperkuat validitas model regresi dalam penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,977 ^a	0,954	0,949	0,0216370	1,812

a. Predictors: (Constant), Defisit terhadap PDRB, Penerimaan Pajak, Ketergantungan Fiskal

b. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2025

Hasil uji Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 1,812, yang berada dalam rentang antara 1,6528 dan 2,3472. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi bebas dari autokorelasi, sehingga asumsi independensi residual telah terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,612	0,106		5,782	0,000
Ketergantungan Fiskal	-0,627	0,115	-0,574	-5,451	0,000
Penerimaan Pajak	0,214	0,054	0,413	3,959	0,000
Defisit terhadap PDRB	-0,791	1,756	-0,019	-0,450	0,656

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 8 didapatkan uji regresi linier berganda pada penelitian ini menghasilkan persamaan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,612 - 0,627X_1 + 0,214X_2 - 0,791X_3 + e$$

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linier berganda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0,612 menunjukkan bahwa apabila Ketergantungan Fiskal (X_1), Penerimaan Pajak (X_2), dan Defisit Anggaran terhadap PDRB (X_3) bernilai nol, maka nilai Kemandirian Keuangan (Y) nilainya positif yaitu sebesar 0,612 persen.

2. Koefisien regresi variabel Ketergantungan Fiskal (X1) sebesar -0,627 menunjukkan bahwa Ketergantungan Fiskal berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan. Artinya, jika Ketergantungan Fiskal meningkat sebesar satu persen, maka Kemandirian Keuangan akan menurun sebesar 0,627 persen dan sebaliknya.
3. Koefisien regresi variabel Penerimaan Pajak (X2) sebesar 0,214 menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan. Artinya, setiap peningkatan Penerimaan Pajak sebesar satu persen akan meningkatkan Kemandirian Keuangan sebesar 0,214 persen dan sebaliknya.
4. Koefisien regresi variabel Defisit Anggaran terhadap PDRB (X3) sebesar -0,791 menunjukkan bahwa Defisit Anggaran terhadap PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan. Artinya, peningkatan defisit anggaran relatif terhadap PDRB sebesar satu persen akan menurunkan Kemandirian Keuangan sebesar 0,791 persen, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik berdasarkan uji t.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi

Tabel 9 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.977 ^a	0,954	0,949	0,0216370

a. Predictors: (Constant), Defisit terhadap PDRB, Penerimaan Pajak, Ketergantungan Fiskal

b. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 9, nilai R sebesar 0,977 menunjukkan hubungan sangat kuat antara variabel independen dan dependen. Nilai R Square sebesar 0,954 mengindikasikan bahwa 95,4% variasi kemandirian keuangan daerah dijelaskan oleh ketergantungan fiskal, penerimaan pajak, dan defisit anggaran terhadap PDRB. Sisanya 4,6% dipengaruhi faktor lain di luar model. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,949 mengonfirmasi kemampuan prediktif model tetap tinggi meski telah disesuaikan. Dengan demikian, model regresi ini sangat tepat dalam menjelaskan variasi kemandirian keuangan daerah.

Uji F (Simult)

Tabel 10 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0,298	3	0,099	212,416	0.000 ^b
Residual	0,015	31	0,000		
Total	0,313	34			

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan

b. Predictors: (Constant), Defisit terhadap PDRB, Penerimaan Pajak, Ketergantungan Fiskal

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 10 (ANOVA), nilai F sebesar 212,416 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05) menunjukkan bahwa H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima. Artinya, ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, model regresi layak digunakan karena mampu menjelaskan pengaruh variabel independen secara bersama-sama.

Uji T (Prsial)

Tabel 11 Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	0,612	0,106		5,782	0,000
Ketergantungan Fiskal	-0,627	0,115	-0,574	-5,451	0,000
Penerimaan Pajak	0,214	0,054	0,413	3,959	0,000

Defisit terhadap PDRB	-0,791	1,756	-0,019	-0,450	0,656
-----------------------	--------	-------	--------	--------	-------

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 4.13, Ketergantungan Fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah ($\beta = -0,627$; sig. = 0,000), sehingga H_{01} ditolak. Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan ($\beta = 0,214$; sig. = 0,000), sehingga H_{02} ditolak. Sementara itu, Defisit Anggaran terhadap PDRB tidak berpengaruh signifikan ($\beta = -0,791$; sig. = 0,656), sehingga H_{03} tidak ditolak. Artinya, hanya dua variabel pertama yang terbukti signifikan memengaruhi kemandirian keuangan daerah.

PEMBAHASAN

Pengaruh Ketergantungan Fiskal terhadap Kemandirian Keuangan

Hasil uji t menunjukkan Ketergantungan Fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah ($\beta = -0,627$; sig. = 0,000). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketergantungan terhadap transfer pusat, semakin rendah kemandirian fiskal daerah. Dalam *Teori Agensi*, kondisi ini menunjukkan potensi moral hazard karena pemerintah daerah cenderung pasif dalam menggali PAD. Secara *Teori Otonomi Daerah*, ketergantungan tinggi melemahkan makna otonomi fiskal. Hasil ini sejalan dengan Kamilaus et al. (2020), Riza & Zuripal (2023), dan Digdowiseiso (2023).

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan

Penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan ($\beta = 0,214$; sig. = 0,000). Pajak daerah sebagai komponen utama PAD mencerminkan kemampuan fiskal lokal. Dalam *Teori Stewardship*, optimalisasi pajak menunjukkan tanggung jawab fiskal dan keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah. Hasil ini diperkuat oleh studi Nggilu (2016), Dewantoro (2022), dan Saraswati & Nurharjanti (2021), yang menunjukkan peran penting pajak dalam memperkuat kapasitas fiskal.

Pengaruh Defisit Anggaran terhadap PDRB terhadap Kemandirian Keuangan

Hasil uji t menunjukkan bahwa Defisit Anggaran terhadap PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah ($\beta = -0,791$; sig. = 0,656). Meskipun secara

teori defisit mencerminkan tekanan fiskal, hasil ini menunjukkan bahwa di DIY, defisit bukan faktor utama yang memengaruhi tingkat kemandirian.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, struktur ekonomi DIY didominasi sektor jasa, pendidikan, dan pariwisata sektor-sektor yang tidak secara langsung menghasilkan PAD tinggi, sehingga fluktuasi defisit tidak serta merta mencerminkan perubahan kemampuan fiskal. Kedua, dukungan Dana Keistimewaan (Danais) serta transfer pusat seperti DAU dan DAK mampu menutup gap fiskal akibat defisit, sehingga pengaruh defisit terhadap kapasitas fiskal menjadi lemah. Ketiga, rasio defisit terhadap PDRB di DIY cenderung stabil dan rendah selama periode penelitian, menyebabkan variasi data yang kecil dan signifikansi statistik yang rendah.

Temuan ini sejalan dengan Fadli & Asnawi (2022) di Aceh, yang juga menunjukkan pengaruh tidak signifikan karena keberadaan dana otonomi khusus dari pusat. Artinya, di daerah dengan dukungan fiskal pusat yang tinggi, tekanan akibat defisit anggaran cenderung tidak berdampak besar terhadap kemandirian keuangan.

Pengaruh Disiplin Fiskal terhadap Kemandirian Keuangan

Secara simultan, ketiga rasio disiplin fiskal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan ($F = 212,416$; $\text{sig.} = 0,000$). Ini menunjukkan bahwa kombinasi pengurangan ketergantungan, peningkatan pajak, dan pengendalian defisit merupakan strategi efektif membangun kemandirian fiskal. Temuan ini selaras dengan *Teori Disiplin Fiskal, Agensi*, dan *Stewardship*, yang menekankan pentingnya tata kelola fiskal yang efisien dan bertanggung jawab. Secara metodologis, model ini memperkaya studi terdahulu dengan pendekatan simultan yang menangkap hubungan antar dimensi disiplin fiskal secara menyeluruh

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa disiplin fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi dari upaya mengurangi ketergantungan fiskal, meningkatkan penerimaan pajak daerah, dan menjaga keseimbangan fiskal menjadi kunci penting dalam mendorong kemandirian fiskal daerah.

Disiplin fiskal belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemandirian keuangan secara optimal, faktor-faktor yang menyebabkan kemandirian keuangan pemerintah kab/kota di DIY belum optimal karena masih terdapat tantangan seperti rendahnya kontribusi PAD, ketimpangan kemampuan fiskal antar wilayah, dan struktur ekonomi yang tidak langsung mendukung peningkatan PAD. Selain itu, pandemi COVID-19 turut memperburuk kondisi fiskal daerah melalui penurunan pendapatan dan meningkatnya ketergantungan pada dana pusat. Berdasarkan hal tersebut, penguatan disiplin fiskal yang menyeluruh dan berkelanjutan tetap menjadi strategi utama untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah secara jangka panjang.

Berdasarkan penelitian kuantitatif secara parsial, penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan, artinya semakin tinggi penerimaan pajak, semakin besar kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pengeluaran secara mandiri. Ketergantungan fiskal berpengaruh negatif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat justru memperlemah otonomi fiskal daerah. Sementara itu, rasio defisit anggaran terhadap PDRB tidak berpengaruh signifikan, yang mengindikasikan bahwa defisit belum menjadi faktor utama dalam menjelaskan variasi kemandirian fiskal antar daerah di DIY.

Saran

Untuk Pemerintah Daerah DIY

- Kurangi ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat dengan memperluas basis pajak dan diversifikasi pendapatan daerah.
- Optimalkan penerimaan pajak melalui perbaikan sistem, pemanfaatan teknologi, peningkatan SDM, dan edukasi pajak.
- Kendalikan defisit anggaran secara disiplin untuk menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, meskipun tidak signifikan secara statistik.

Untuk Masyarakat

- Tingkatkan kepatuhan membayar pajak daerah seperti PBB dan retribusi untuk memperkuat PAD dan kemandirian fiskal.
- Berpartisipasi aktif dalam pengawasan anggaran guna mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi belanja publik.

Untuk Peneliti Selanjutnya

- Gunakan variabel tambahan seperti efektivitas belanja, tax effort, dan efisiensi anggaran untuk memperkaya analisis.
- Terapkan metode campuran atau kualitatif untuk menggali aspek non-keuangan seperti tata kelola dan politik anggaran.
- Perluas cakupan wilayah agar hasil dapat dibandingkan dan digeneralisasi ke daerah lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansa dan P. Wibowo, “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19,” *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol. 4, no. 3, pp. 150–168, 2022.
- Antara News, “Kesadaran masyarakat DIY bayar pajak masih rendah,” 15 Mar. 2018. [Online]. Tersedia: <https://jogja.antaranews.com/berita/329918/kesadaran-masyarakat-diy-bayar-pajak-masih-rendah>
- Antaranews Kalsel, “PAD Kota Yogyakarta diperkirakan turun kisaran 30-50 persen,” 15 Mei 2020. [Online]. Tersedia: <https://kalsel.antaranews.com/berita/157482/pad-kota-yogyakarta-diperkirakan-turun-kisaran-30-50-persen>
- Antaranews, “Akibat COVID-19, Bantul kehilangan PAD sebesar Rp97 miliar,” 30 Mei 2020. [Online]. Tersedia: <https://www.antaranews.com/berita/1524788/akibat-covid-19-bantul-kehilangan-pad-sebesar-rp97-miliar>
- A. Azwar, “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017–2021,” *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, vol. 7, no. 1, pp. 1–25, 2023.
- A. Barbier-Gauchard, C. Briand, dan B. Schmitt, “National fiscal rules and fiscal discipline in the European Union,” *Applied Economics*, vol. 53, no. 32, pp. 3774–3792, 2021. [Online]. Tersedia: <https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1859453>
- BPS DIY, *Statistik Ekonomi dan Keuangan DIY*, 2023.

-
- J. H. Davis, F. D. Schoorman, dan L. Donaldson, "Toward a Stewardship Theory of Management," *Academy of Management Review*, vol. 22, no. 1, pp. 20–47, 1997. [Online]. Tersedia: <https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258>
- D. A. Dewantoro, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah," *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, vol. 1, no. 2, pp. 38–47, 2022.
- K. Digdowiseiso dan D. Kaliwattu, "Analisis kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal, dan efektivitas fiskal Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2018–2022," *Jurnal Ilmiah Global Education*, 2023.
- F. Fadhli, A. Asnawi, dan J. Jummaini, "Peran Tax Effort Pada Pengaruh Flypaper Effect Dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh," *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, vol. 7, no. 2, pp. 143–155, 2023.
- A. Halim, *Manajemen keuangan sektor publik*, Edisi ke-2. Jakarta: Salemba Empat, 2023.
- F. N. Hariyanti, *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, STIE YKPN, 2021.
- M. C. Jensen dan W. H. Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics*, vol. 3, no. 4, pp. 305–360, 1976. [Online]. Tersedia: [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- G. Kopits, "Can fiscal sovereignty be reconciled with fiscal discipline?," *Acta Oeconomica*, vol. 62, no. 2, pp. 141–160, 2012. [Online]. Tersedia: <https://doi.org/10.1556/aoecon.62.2012.2.1>
- M. S. Kumar dan T. Ter-Minassian, Eds., *Promoting Fiscal Discipline*. Washington D.C.: International Monetary Fund, 2007.
- A. Kusumaputra, "Dekonstruksi pembangunan berkelanjutan melalui otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya air pasca Omnibus Law," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, vol. 1, no. 1, 2021. [Online]. Tersedia: <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.590>
- D. A. D. Nasution, *Akuntansi Sektor Publik: Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah*. Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

- F. Nggilu, “Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 16, no. 4, 2016.
- B. Petreski, M. Petreski, G. Bishev, dan A. Bexheti, *Fiscal Discipline and the Efficiency of Fiscal Rules in North Macedonia: The Path to Sustainability*, Working Paper No. 2024-11/53, Finance Think – Economic Research and Policy Institute, 2024.
- R. E. Rubin, P. R. Orszag, dan A. Sinai, “Sustained Budget Deficits: Longer Run U.S. Economic Performance and the Risk of Financial and Fiscal Disarray,” *Brookings Institution*, 2004.
- N. P. Saraswati dan N. N. Nurharjanti, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah,” *Prosiding BIEMA*, vol. 2, pp. 51–64, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.